

ABSTRAK

Ade Mellyanti Sari, NIM . 3403150107. “Peran Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Ciamis)”. Dibawah bimbingan Dede Abdul Rozak, S.E., M.M. (Pembimbing I) dan Dendy Saeful Akbar, S.E., M.Si. (Pembimbing II).

Inspektorat Kabupaten Ciamis sebagai salah satu sub sistem pengawasan fungsional yang lebih profesional, tanggap, dan responsif terhadap permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis belum di realisasikan secara maksimal. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal APIP di Inspektorat Kabupaten Ciamis dinilai belum efektif dalam meningkatkan kapabilitas APIP, dilihat dari hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kabupaten Ciamis masih memiliki 10 pernyataan yang belum terimplementasi secara baik (in progress). Kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Ciamis kurang berperan penting dalam meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) karena tidak memberikan konstribusi yang signifikan dalam perkembangan dalam meningkatkan level kapabilitas APIP. Kedepannya Inspektorat Kabupaten Ciamis dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya, meningkatkan pemahaman dan peningkatan kualitas APIP agar dapat meningkatkan kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci : Kinerja Inspektorat, Kapabilitas APIP.

I. PENDAHULUAN

Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah dan berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepada daerah. Untuk mencapai terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif menuju

terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan adanya pengawasan yang andal melalui sinergitas antara pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif. Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peran sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah juga memiliki posisi dan peran yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah daerah.

Dari segi fungsi dasar manajemen mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan, sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kapabilitas APIP memiliki tiga unsur yang saling bersangkutan yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tujuan untuk mewujudkan peran APIP dalam melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien. Begitu juga tingkat pendidikan APIP merupakan salah satu faktor yang menunjang kompetensi APIP karena semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh APIP maka akan semakin baik pula kompetensi APIP dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi : 1) Bagaimana kinerja Inspektorat di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana peran Inspektorat meningkatkan kapabilitas APIP di Kabupaten Ciamis?. Sehingga tujuan dalam penelitian ini meliputi : 1) Untuk mengetahui dan

menganalisis kinerja di Inspektorat Kabupaten Ciamis. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Ciamis. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis peran kinerja Inspektorat daerah dalam meningkatkan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Ciamis.

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini yaitu : untuk Kegunaan Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat Memberikan kontribusi bagi INSPEKTORAT Kabupaten Ciamis agar dapat meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Sedangkan untuk Kegunaan Praktis 1) Bagi INSPEKTORAT Kabupaten Ciamis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau bahan masukan untuk dapat meningkatkan kinerja dan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). 2) Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menjadikan suatu pengetahuan sekaligus sebagai pengalaman berharga dan membagikan ilmu serta dapat bermanfaat untuk orang banyak. 3) Bagi pihak lain, penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan masukan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik untuk mendalami topik yang diangkat penulis dalam penelitian ini.

II. LANDASAN TEORI

Kinerja Inspektorat

Menurut Fahmi (2013:2) kinerja adalah “hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode tertentu”. Menurut Amstrong dan Baron dalam Fahmi (2013: 2) mengatakan ‘kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memeberikan

kontribusi ekonomi'. Dan menurut Bastian dalam Fahmi (2013:2) menyatakan bahwa : 'Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan/ dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi'. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan hasil kerja individu atau organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai suatu tujuan suatu organisasi.

Inspektorat Kabupaten Ciamis selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2019 maupun Rencana Tahun sekarang. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Inspektorat Kabupaten Ciamis. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Selanjutnya hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Inspektorat Kabupaten Ciamis telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengacu terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Ciamis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja dalam buku LKIP Inspektorat Kabupaten Ciamis (2018:18-19) yaitu dengan sasaran strategis :

1. Meningkatnya standar kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dengan indikator Kinerja :

- Prosentase APIP yang memenuhi standar kompetensi

2. Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan serta implementasi SPIP dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Dengan indikator kinerja :

- Prosentase entitas / unit kerja yang diperiksa sesuai dengan PKPT
- Prosentase kasus pengaduan yang ditangani
- Jumlah LHP yang diterbitkan
- Jumlah LHR yang diterbitkan
- Jumlah LHE yang diterbitkan
- Prosentase penyelesaian tindaklanjut
- Prosentase SOPD yang telah direviu
- Jumlah Laporan Keuangan SOPD yang sesuai SAP

- Prosentase asistensi ke SOPD yang telah mengaplikasikan SPIP
- Jumlah SOP, pedoman dan kebijakan pengawasan yang diterbitkan.

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Kapabilitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif (Masdan, Susan R. et. al. 2017). Pengertian kapabilitas menurut kamus bahasa Indonesia adalah :

Kapabilitas, artinya juga sama dengan Kompetensi, yaitu Kemampuan. Namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER – 1633/K/Jf/2011 :

Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP secara efektif.

Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP, sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP dan pembinaan kapabilitas APIP BPKP berupaya untuk meningkatkan kapabilitas APIP agar terwujud APIP yang efektif. *Institute of Internal Auditors (IIA)* telah mengembangkan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik yang disebut *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. IA-CM

menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif. Indikator peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menurut Maryani (2017:93) yaitu :

1. Peran dan layanan APIP
2. Pengelolaan SDM
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja
5. Budaya dan hubungan organisasi
6. Struktur tata kelola

Terdapat lima level kapabilitas APIP dalam metode IACM, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Model Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu ke praktik yang berlaku Internasional dari IIA yang disebut *Internal Audit Capability Model* (IACM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan satu variabel *independen* yaitu Kinerja Inspektorat daerah dan satu variabel *dependen* yaitu peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan ini ialah penelitian kepustakaan, wawancara, dokumentasi. Serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis data deskriptif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Inspektorat di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Ciamis telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengacu terhadap dokumen perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2018. Penilaian kinerja tersebut dilakukan melalui evaluasi terhadap capaian indikator kinerja yang diperjanjikan berdasarkan data kinerja yang diperoleh dan diolah sebagai gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misidan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan. Hal ini terbukti bahwa dari pengukuran kinerja terhadap target kinerja tahun 2018 yang telah diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya standar kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Pada tahun 2018 terjadi kenaikan poin sebesar 4,2 % yang disebabkan rencana diklat/bimtek/workshop yang dilaksanakan pusat pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut telah diikuti oleh 8 (delapan) orang pegawai lingkup Inspektorat Kabupaten Ciamis.

2. Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan serta implementasi SPIP dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Pada capaian kinerja sasaran ini diperoleh nilai rata-rata 109,23% dan menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2018 tercapai dengan sangat baik. Pelampauan capaian target kinerja sasaran terjadi 4 (empat) indikator kinerja sasaran, yaitu :

- Prosentase penyelesaian tidak lanjut pada tahun 2018 tercapai 125,49%
- Jumlah laporan keuangan SOPD yang sesuai SAP terealisasi 107,4% dari target 27 laporan keuangan SOPD.
- Prosentase asistensi ke SOPD yang telah mengaplikasikan SPIP tahun 2018 terealisasi 40,74% dari target 40%.
- Pedoman dan kebijakan pengawasan yang di terbitkan dari rencana 7 (tujuh) dokumen terealisasi sebanyak 11 dokumen.

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis dinilai telah maksimal dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas sesuai pada PP

Nomor 29 Tahun 2014, serta mewujudkan misi dan visi Inspektorat Kabupaten Ciamis. Tetapi dari pencapaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,38% (pada tabel 4.2) meskipun masih ada indikator kinerja Tahun 2018 di bandingkan Tahun 2017. Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Cahyudi Hidayat, S.E bagian Pengawas Pemerintah Madya bahwa proses yang dilakukan dalam mengukur kinerja di Inspektorat di Kabupaten Ciamis dengan melakukan evaluasi kinerja dengan tahun sebelumnya. Realisasi capaian tahun 2018 memiliki kinerja “Sangat Baik” dengan cara mengevaluasi terhadap komponen manajemen kinerja seperti pencapaian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, pencapaian sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Kapabilitas Aparat Pengawas Internal APIP di Inspektorat Kabupaten Ciamis dinilai telah efektif dalam meningkatkan kapabilitas APIP terbukti dengan realisasi yang telah dilakukan QA yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis dan perwakilan BPKD Provinsi dengan penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Ciamis diukur dengan 6 elemen, penelitian ini sesuai dengan indikator yang digunakan Maryani (2017:93) yaitu:

1. Peran dan layanan APIP
2. Pengelolaan SDM
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja
5. Budaya dan hubungan organisasi
6. Struktur tata kelola

Diperoleh kesimpulan bahwa kapabilitas Inspektorat Kabupaten Ciamis berada pada level 3 (tiga) Dengan Catatan karena 4 (empat) elemen berada di level 3 (tiga) dan 2 (dua) elemen masih di level 2 (dua). Dengan QA terhadap 14 KPA dari 6 (enam) elemen dengan 93 pernyataan, dan 10 pernyataan belum terimplementasi secara baik (*in progress*). Hasil dari wawancara dengan Bapak Cahyudi Hidayat, S.E sebagai Pengawas Pemerintah Madya bahwa Inspektorat Kabupaten Ciamis berada pada level 3 DC “Dengan Catatan”, upaya yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan kapabilitas APIP dengan meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam peningkatan kapabilitas APIP masih kurangnya pengetahuan dalam profesi kinerja, belum seluruh OPD melakukan asistensi, dan di Inspektorat Kabupaten Ciamis belum memiliki aplikasi SIM-HP dalam mengukur proses dan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Peran Kinerja Inspektorat Daerah dalam Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran kinerja Inspektorat daerah dalam meningkatkan kapabilitas APIP ternyata dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan dalam meningkatkan level kapabilitas APIP. Kinerja Inspektorat Kabupaten Ciamis dinilai belum maksimal dalam

pencapaian dalam mewujudkan misi dan visi Inspektorat, walaupun dilihat dari evaluasi pencapaian kinerja tahun 2018 dibandingkan terhadap realisasi capaian kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan, tetapi masih ada indikator kinerja tahun 2018 mengalami penurunan di banding 2017. Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diberikan kewenangan lebih untuk berperan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Andre Rahmat Kurniawan (2017) mengemukakan bahwa semakin tinggi nilai yang dicapai oleh Inspektorat akan menunjukkan kemampuan yang semakin tinggi pula dalam aktivitas pengawasan dan pembinaan sektor publik yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Persamaan Indikator yang digunakan dengan penulis didukung dengan pernyataan Susan Rabbany Madsan,et.al (2017) yaitu:

1. Peran dan Layanan APIP
2. PengelolaanSDM
3. Praktik profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen kinerja
5. Budaya dan hubungan organisasi
6. Struktur tata kelola.

Dilihat dari hasil penjaminan kualitas pelaksanaan penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2018 menyimpulkan bahwa 4 (empat) elemen berada di level 3, dan 2 (dua) elemen berada di level 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Ciamis berada pada “level 3 Dengan Catatan”. Dari hasil QA, masih terdapat KPA yang belum

terimplementasi secara baik (*in progress*) sebanyak 10 pernyataan. KPA yang masih dalam proses implementasi dan masih berada pada level 2, yaitu :

- Pada Elemen III Praktik profesional dengan KPA Perencanaan Audit berbasis risiko ada beberapa hal disebabkan oleh:
 - Belum seluruh OPD memahami dalam menyusun register resiko.
 - Adanya keterbatasan personil APIP dalam melakukan bimbingan teknis/asistensi kepada seluruh OPD
- Pada Elemen IV Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja dengan KPA Pelaporan manajemen APIP.

Inspektorat Kabupaten Ciamis belum memiliki aplikasi sistem informasi kinerja untuk pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pengawasan, namun Inspektorat Kabupaten Ciamis telah mengirim surat permohonan untuk meng-*install* aplikasi SIM-HP kepada perwakilan BPKP Jawa Barat dengan Surat Nomor 900/1679/Inspkt tanggal 17 Desember 2018. Hal tersebut disebabkan Inspektur Kabupaten Ciamis merasa cukup dalam melaksanakan / memproses data kegiatan pengawasan dengan secara manual/excel.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kinerja Inspektorat daerah dalam meningkatkan kapabilitas APIP ternyata tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan dalam meningkatkan level kapabilitas APIP. Peran kinerja Inspektorat daerah diukur dengan evaluasi kinerja yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015

tentang pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil penelitian diatas dikuatkan dengan pernyataan Marliani, et.al (2018) bahwa ada beberapa aspek yang menjadi penyebab belum diimplementasikannya secara maksimal penguatan peran APIP pada Inspektorat adalah formasi auditor dan calon auditor belum sebanding dengan kualitas yang diharapkan, kompetensi SDM, auditor belum semuanya memadai, alokasi anggaran Inspektorat yang masih kecil, lemahnya idenpedensi Inspektorat serta kurangnya objektivitas dari beberapa auditor. Dan penelitian ini sejalan dengan pernyataan Hidayat Taufik, et.al (2017) Inspektorat daerah, sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis baik ditinjau dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis dinilai belum di realisasikan secara maksimal. Meskipun dapat di lihat dari perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami kenaikan persentase sebesar 3,38%. Meskipun masih ada indikator kinerja Tahun 2018 mengalami penurunan di banding Tahun 2017.
2. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal APIP di Inspektorat Kabupaten Ciamis dinilai efektif dalam meningkatkan kapabilitas APIP, dilihat dari hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kabupaten Ciamis berada pada level 3 Dengan Catatan karena masih memiliki 10 pernyataan yang belum terimplementasi secara baik (*in progress*) meliputi elemen praktik profesional dan akuntabilitas dan manajemen kinerja.

3. Kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Ciamis dinilai berperan penting dalam meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) . Pada Inspektorat Kabupaten Ciamis, artinya jika kinerja dilaksanakan secara baik maka kapabilitas APIP akan meningkat.

SARAN

1. Bagi Inspektorat Kabupaten Ciamis
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan terus melakukan perubahan dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi sebagai mestinya agar terwujudnya pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas kapabilitas APIP dengan cara tetap mengevaluasi kinerja dengan komponen-komponen manajemen kinerja sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Meningkatkan pemahaman kepada seluruh OPD dalam menyusun register resiko dengan cara mengikuti atau melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tersebut.
 - c. Meningkatkan kualitas personil APIP dengan cara melakukan bimbingan teknis atau asistensi kepada seluruh OPD.
2. Bagi peneliti berikutnya, penulis menyarankan agar menggunakan tambahan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja Inspektorat , dan memperluas objek penelitian yang lebih luas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi Jusuf, Amir. 2003. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta : Salemba Empat.

- Abdul, Halim. 2015. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi kelima. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik Jilid I*. Jakarta: Edisi Keempat. Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. 2013. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi Empat. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmed, Riahi Belkaoui. 2011. *Accounting Theory Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Apip, Mohamad dan A. Dendy Syaiful. 2014. *Pengantar Akuntansi 1*. Ciamis : CV Galuh Nurani.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah. 2014. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta: AAPI.
- Dwiyanto, Agus. et. al. 2002. *Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. UGM.
- Fahmi, Irham.2013. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Cetakan ketiga. Alfabeta.
- Harahap, Sofyan S. 2016. *Analisis Kritisatas Laporan Keuangan*. Jakarta: Cetakan ke-13, PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Edisi Revisi 2011, Cetakan empat belas. Raja Grafindo Persada.
- Husein, Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Inspektorat Kabupaten Ciamis LKIP Tahun 2018.
- Kartikahadi, Hans et. al. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. IAI : Edisi Kedua, Buku 1.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardiamo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi

- Maryani, Tyarlin. 2017. *Institusionalisasi Internal Audit Capability Model pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Ekonomi Bisnis Vol.22, No. 2, Oktober 2017 : 87-102.
- Masdan, Susan R. et. al. 2017. *Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putera Gembala.2013. Pengertian Kapabilitas. Tersedia : <http://antarberita.blogspot.com/2014/01/pengertian-ilmu-pengetahuan-menurut-kbbi.html#> [12 Januari 2019]
- Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ciamis. Tahun 2014-2019. Tersedia : <http://inspektorat.ciamiskab.go.id/> [20 Januari 2019].
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A dan Sutaryo. 2016. *Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung.
- Suhayati, Ely dan Anggadini, Sri Dewi. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta : Edisi pertama, Cetakan Pertama. Graha Ilmu.
- Widyananda, Herman. *Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah untuk Penegakkan Good Governance di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung. 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.

Peraturan Kepala BPKD Nomor PER- 1633/K/2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawas di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Permenpan No.4 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER – 1633/K/Jf/2011

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Perangkat Pemerintah Daerah.